

2. Saran yang dituju kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penerbitan KTP-el bagi warga negara asing berupa melakukan sosialisasi baik secara langsung atau melalui media sosial, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada semua penduduk khususnya warga negara asing yaitu ketepatan waktu dalam proses penerbitan KTP-el, dan melakukan evaluasi terkait dari sistem pelayanan online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Basah, Sjachran. Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara, (Alumni: Bandung, 1992)
- Darda Syahrial, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), halaman 66.
- H. M. Galang Asmara dan AD. Basniwati, Hukum Keimigrasian, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2020).
- H.R., Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Hidjaz, Kamal, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010).

- Ibu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996).
- Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa, 2012), halaman 34.
- Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Librayanto, Romi, Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Makassar: PuKAP, 2008).
- Mamudji, Sri. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005).
- Narimawati, Umi. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. (Bandung: Agung Media, 2008).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Nugroho, Riant, *Public Policy*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011).
- Prasetyaningtyas, Y. *STATUS KEANGGOTAAN WARGA NEGARA ASING DALAM GERAKAN PRAMUKA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). 2012.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi. Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi. 2nd ed. (Malang: Setara Press., 2016).
- Skrentny, John D., Gell-Redman, Micah., & Lee, Jack Jim Garry. Japan, *The United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy*. *American Behavioral Scientist*, Vol.58, (No.12), pp. 1614-1633. <https://doi.org/10.1177/0002764212441783>. 2012.
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press. 1981).

- Srijanti, A. Rahman, dan Purwanto S.K, Etika Berwarga Negara, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suratman dan Phillips, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, (Yogyakarta: YPAP, 2003).
- Usmawadi, Petunjuk Praktis Penelitian Hukum, (Palembang: FH Unsri, 2007).
- Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), halaman 55
- Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

Jurnal

- Ardani, Mira N. Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing di Indonesia. *Law Reform*, Vol.13, (No.2), pp.204-216. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16156>. 2017.
- Cristianingsih, E. “Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung”. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 12(2). 2020.
- Dewi, D. P., Harjoyo, H., & Irawan, R. “Pelayanan Proses Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik (KTP-el)”. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 9(1), 35-51. 2020.
- Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. 2010.

- Febriharini, M. P. “Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan”. *Serat Acitya*, 5(2), 17. 2017.
- Hakim, Rizqy Iman Aulia L. Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi. *Unnes Law Journal*, Vol.4, (No.1), pp.66- 79. <https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7267>. 2015.
- Ismail, I., & Aminah, S. “Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerbitan KTP Elektronik di Kantor Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo”. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 2(1), 542-548. 2021.
- Jazuli, A. Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, (No.3), pp.211- 225. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.V10.211-225>. 2016.
- Kholifah, R. N., & Setiyono, B. “Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan E-Ktp Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang”. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(01), 161-170. 2018.
- Mahsyar, A. “Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik”. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2). 2011.
- Niazela, A., & Herlina, A. “MENGIDENTIFIKASI PENYELEWENGAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA”. 2020.
- Ninage, M. B., & Diamantina, A. “Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 197-212. 2022.
- Nugroho, R. A. “EVALUASI ADMINISTRATIF PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013

- TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1). 2017.
- Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”. *Perspektif*, 8(2), 77-83. 2019.
- Ramadhan, H. “PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING SEBAGAI SUBYEK HUKUM PAJAK”. *Media Iuris*, 1(2), 266-280. 2018.
- Rismawati, & Oja, H. “Etika Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke”. (H. Oja, & A. P. Yusuf, Eds.) *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, VIII (1), 32-42. 2019.
- Rohman, D. F. “Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan terpadu” (Doctoral dissertation, Brawijaya University). 2013.
- Simarmata, M., & Simanjuntak, A. P. “PERANAN FASILITAS KERJA DALAM MEMPERCEPAT PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK) PADA KANTOR CAMAT PINANG SORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH”. *Jurnal Akrab Juara*, 5(4), 162-176. 2020.
- Sutejo, D., Kusmanto, H., Warjio, W., & Lubis, A. A. “Implementasi Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur”. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 162-167. 2020.
- Syahrin, M.A., “Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1). 2018.
- Lestari, Jetty Lengkong, F. D., & Tampi, G. B. “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado”. *Jurnal Administrasi Publik FISIP Unsrat*, 3 (400). 2016.

Wulandari, A., Hardjanto, U. S., & Saraswati, R. "PENERAPAN e-KTP DI KOTA SEMARANG". *Diponegoro Law Journal*, 2(2), 1-19. 2013.

Zuliah, A., & Pulungan, M. A. "Pelayanan Publik dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia". *Law Jurnal*, 1(1), 32-42. 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Penyelenggaraan Layanan Elektronik (E Service) Administrasi Kependudukan Di Kota Semarang.

Internet

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang. “Tugas Pokok dan Fungsi”.

<https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-2/>.

(2022). (diakses pada tanggal 25 Juli 2023).

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. “Sejarah Imigrasi di Indonesia”. http://semarang.imigrasi.go.id/?page_id=45899. (2019). (diakses pada tanggal 25 Juli 2023).

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. “Struktur Organisasi”. http://semarang.imigrasi.go.id/?page_id=48414. (2019). (diakses pada tanggal 25 Juli 2023).

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. “Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang”. http://semarang.imigrasi.go.id/?page_id=47800. (2019). (diakses pada tanggal 25 Juli 2023).

PPID Kota Semarang, Cara Mendapatkan Izin Tinggal Tetap Bagi Warga Negara Asing (WNA), <https://ppid.semarangkota.go.id/kb/cara-mendapatkan-izin-tinggal-tetap-bagi-warga-negara-asing-wna/>, (2023, Januari 24), (diakses pada tanggal 18 Juni 2023)